

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan tuntutan good governance. Untuk mencapai tata pemerintahan yang baik, diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik. Reformasi manajemen sektor public sangat ditentukan oleh reofrmasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Jika reformasi pengelolaan keuangan daerah baik, maka dapat menghasilkan pelayanan publik yang baik.(Irma Aldina, 2016)

Daya serap fiskal merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah dalam mengatur roda perekonomian. Anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang signifikan dalam mendoong pertumbuhan ekonomi daerah jika diserap secara optimal. Penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa pada umumnya lambat bahkan realisasinya seringkali menumpuk diakhir tahun karena berbagai permasalahan yang dihadapi baik dari aspek administrasi maupun dari aspek teknis (Rerung et al., 2017)

Keterlambatan dalam penyerapan anggaran pada Pemerintah daerah merupakan salah satu masalah yang terjadi tahun ini. Hal ini menjadi masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Jika ini terkait dengan proyek

infrastruktur fisik untuk layanan umum, maka keterlambatan keterlambatan dalam hal ini akan mengurangi keterlambatan atas manfaat yang akan diterima dan dinikmati oleh masyarakat, misalnya, buruknya kualitas barang dan jasa yang disediakan dalam waktu yang terbatas (Alfayuni & Dahtiah, 2021)

Fenomena yang diambil dalam penelitian ini yaitu berdasarkan serapan anggaran kabupaten banyumas sudah mencapai 81% di November 2020. Berbeda dengan tahun sekarang yaitu 2021 serapan anggaran kabupaten banyumas baru mencapai 68,8% Hal ini menarik untuk dikaji karena dilihat dari berbagai faktor penerapan e-government, sumber daya manusia, dan sistem pengendalian internal.. Sejak Tahun 2016, Pemkab banyumas sudah menggunakan sistem E-Budgetting dalam pelaksanaan APBD 2016. Hal tersebut untuk menghindari adanya dana siluman. Anggota DPRD Banyumas mengatakan, Eko Purwanto (radarbanyumas.co.id) mengatakan, dengan sistem e-budgeting menjamin transparansi keuangan, akuntabel anggaran dan hal yang terpenting yakni dapat diakses oleh semua masyarakat.

Menurut dia, E-budgeting sudah diatur dalam PP no 58 tahun 2005 tentang keuangan daerah dan juga Undang-undang no 23 tahun 2014 pada pasal 391 ayat satu dan dua yang berbunyi pemda wajib memberikan informasi terkait pembangunan daerah dan juga keuangan daerah.

Penyerapan anggaran yang terlambat membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Darma (2014) menyatakan pemerintah daerah perlu berperan lebih baik

dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan sumber daya. Gomes (1995) menyebutkan bahwa memaksimalkan potensi sumber daya manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap upaya organisasi untuk mencapai tujuannya. Secanggih apapun teknologi dan informasi, tanpa sumber daya manusia akan sulit bagi suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang bekerja dengan segala kemampuan, keterampilan dan pengetahuannya akan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Bagi pemerintah, tujuan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan penyerapan anggaran dari program dan kegiatan yang dianggarkan dalam APBD. Penyerapan anggaran APBD yang belum maksimal oleh beberapa SKPD menunjukkan bahwa SKPD tersebut belum mampu memaksimalkan sumber daya manusianya (Dewi et al., 2017). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran. Hasil penelitian (Musnawati et al., 2019), (Cut Malahayati, Islahuddin, 2015), (Indi Zaenur Anisa, 2017), (Ramdhani & Anisa, 2017), (Kadek Mia Ranisa Putri et al., 2017) Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Hal lainnya yang mempengaruhi serapan anggaran pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi dianggap sebagai alat yang digunakan individu untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan

pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001. Teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dan telekomunikasi dengan teknologi lain seperti perangkat keras, perangkat lunak, basis data, teknologi jaringan, dan peralatan telekomunikasi lainnya. Selain itu, teknologi informasi digunakan dalam sistem informasi organisasi untuk memberikan informasi kepada pengguna dalam rangka pengambilan keputusan (Maharsi, 2000). Menurut (JURNALI & SUPOMO, 2002), penggunaan teknologi informasi mempengaruhi perilaku terkait penggunaan teknologi tersebut dalam menyelesaikan tugas. Komputer, sebagai bagian dari teknologi informasi, membawa perubahan besar bagi organisasi dalam cara mereka melakukan pekerjaannya. Penggunaan komputer memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah, terutama dalam hal efisiensi dan efektifitas. Diharapkan proses perpindahan dari cara kerja manual ke sistem komputerisasi akan memungkinkan pekerjaan dilakukan secara cepat dan akurat sehingga kinerja organisasi secara keseluruhan dapat meningkat. Dalam menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka mengupayakan terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,

Pemanfaatan teknologi informasi menurut (JIN, 2003) merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pengukuran didasarkan pada intensitas penggunaan, frekuensi penggunaan, dan jumlah aplikasi atau

perangkat lunak yang digunakan. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personel yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan kinerja para pemangku kepentingannya. Hasil penelitian dari (Tofani et al., 2020) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Anggaran.

Penyerapan anggaran dapat didukung oleh pengendalian internal pemerintah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran negara secara efektif dan efisien. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri /pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 dijelaskan 5 indikator yang dipakai untuk mengukur memadai atau tidaknya sistem pengendalian intern pemerintah, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern. Hasil penelitian dari (Kennedy et al., 2020), (Metyani, 2015), (Hertati, 2016), Sistem Pengendalian Internal berpengaruh

signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Namun hasil penelitian (Rahmani Wiansyah et al., 2021) menyatakan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh secara tidak signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Penelitian ini mengembangkan pada penelitian (Yumiati et al., 2016) yang meneliti mengenai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, dan Komitmen Organisasi Terhadap Serapan Anggaran. Pengembangan yang dilakukan adalah menambahkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yumiati et al., 2016) yaitu terletak pada variabel yang digunakan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal/ penentuan variabel ini digunakan berdasarkan serapan anggaran kabupaten banyumas sudah mencapai 81% di November 2021. Hal ini menarik untuk dikaji karena dilihat dari berbagai faktor salah satunya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal. Penerapan e-government Banyumas termasuk yang sudah lebih baik menerapkan e-government.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Apakah sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap serapan anggaran pemerintah?

- b. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap serapan anggaran pemerintah?
- c. Apakah pengendalian internal berpengaruh positif terhadap erapan anggaran pemerintah?

C. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, maka disusun batasan masalah agar penelitian ini menjadi lebih terfokus, terarah, dan tidak jauh dari inti masalah sehingga diberi batasan masalah sebagai berikut:

1. Data penelitian ini diambil dalam satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Banyumas
2. Sampel penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah yang ada di Kabupaten Banyumas dari tahun 2021

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif sumber daya manusia terhadap serapan anggaran pemerintah.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap serapan anggaran pemerintah.

3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap serapan anggaran pemerintah.

E. Manfaat Penelittian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penuli sebagai proses pembelajaran dan meningkatkan wawasan juga dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang mengembangkan ilmu pengetahuan tentang pengaruh sumber daya manusia, teknologi informasi, penerapan e-government dan pengendalian internal terhadap serapan anggaran pemerintah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada satuan kerja perangkat daerah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan sehingga dapat menjadi nilai tambah bagi satuan kerja perangkat daerah.